



Pemberdayaan Ekonomi dan Migrasi Aman di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | ©UN Women 2023

## TATA KELOLA MIGRASI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Periode: Januari 2022 – Juni 2024 (30 bulan)



Pada bulan Desember 2018, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan migrasi yang bermanfaat bagi semua dengan mengadopsi **Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM)**. Sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi para migran, Indonesia berfokus untuk meningkatkan tata kelola migrasi global dan memastikan bahwa hak asasi manusia para migran menjadi dasar dari kebijakan-kebijakannya.

Program bersama ini mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitasnya dalam **pengelolaan migrasi yang berbasis bukti dan responsif gender** pada tingkat nasional dan daerah.

Melalui program ini, PBB mendukung pembentukan mekanisme koordinasi antar kementerian dari **Rencana Aksi Nasional** untuk implementasi komitmen di bawah Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM).



**2,7 juta** warga negara Indonesia bekerja di luar negeri  
Kementerian Luar Negeri (2020)



**355.000** migran internasional di Indonesia  
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, PBB (2020)



**55%** dari pekerja migran adalah perempuan  
Badan Pusat Statistik/BPS (2020)



TINGKAT NASIONAL & DAERAH



Memfasilitasi Dialog Keseluruhan Masyarakat dengan Organisasi Masyarakat Sipil mengenai Mengumpulkan Data Berbasis Bukti untuk Membentuk Kebijakan Migrasi yang Inklusif | ©UNDP 2023

# PENCAPAIAN UTAMA

(per Desember 2023)

## Pelatihan Kapasitas dalam Tata Kelola Migrasi di Tingkat Nasional

- Menyelenggarakan dua rangkaian **pelatihan** untuk 47 pejabat pemerintahan mengenai *Essentials of Migration Management* (EMM 2.0), membantu untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran pemerintah terhadap tata kelola migrasi.
- IOM berkolaborasi dengan kementerian-kementerian utama dalam membuat **Tinjauan Data Sekunder Nasional Indonesia (NSDR)** untuk mendukung pembuatan kebijakan migrasi berbasis bukti. NSDR berfungsi sebagai repositori dari sumber-sumber data migrasi yang penting di Indonesia untuk mendukung upaya lebih lanjut Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi inisiatif Satu Data Migrasi Internasional (SDMI).
- Program bersama berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memfasilitasi diskusi dan konsultasi antar kementerian dan mitra pembangunan terkait dalam mendukung proses inisiatif **Satu Data Migrasi Internasional untuk Indonesia** (SDMI). Pertemuan ini menyoroti pentingnya kerja sama dan sinergi antar kementerian untuk mendukung proses pengumpulan data dan memperkenalkan proses pelaporan rutin ke dalam SDMI.
- **Asesmen Indikator Tata Kelola Migrasi** mengumpulkan 98 indikator dari 39 kementerian/lembaga, yang mencakup enam dimensi tata kelola migrasi yang baik. Proses asesmen ini terdiri dari pertemuan pengantar, Diskusi Kelompok Terarah (FGD), dan rapat konsultasi antar pemangku kepentingan dan pertemuan validasi. Asesmen tersebut menemukan bahwa Pemerintah Indonesia secara aktif memimpin isu-isu terkait migrasi pada badan-badan dan kerangka kerja regional dan internasional. Selain itu, Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan rekrutmen etis pekerja migran Indonesia dan melindungi hak-hak mereka sepanjang semua tahapan migrasi, mulai dari sebelum keberangkatan hingga kepulangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Undang-Undang No. 18 tahun 2017).

## Pelibatan Mitra Masyarakat Sipil

- Memfasilitasi **dialog keseluruhan masyarakat** dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi dan memetakan inisiatif pengelolaan migrasi dan berkontribusi untuk menerapkan Rencana Aksi Nasional untuk prioritas-prioritas KGM pemerintah. Diskusi terkait KGM ini terbagi ke dalam 3 tema yaitu *Rencana Aksi Nasional Implementasi KGM, Pencegahan Kekerasan berbasis Gender, dan Pengumpulan Data Berbasis Bukti untuk Merumuskan Kebijakan Migrasi yang Inklusif*, yang dihadiri sejumlah 212 peserta (50% di antaranya adalah perempuan) yang berasal dari berbagai instansi (17 organisasi masyarakat sipil, 5 universitas, 7 kementerian, dan lembaga, termasuk 6 lembaga PBB dan mitra-mitra pembangunan).



Rapat Konsultasi Multipihak Asesmen MGI Lokal di Semarang, Provinsi Jawa Tengah | ©IOM 2023

# PENCAPAIAN UTAMA

(per Desember 2023)

## Mendorong Implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) di Daerah

- Tiga sosialisasi mengenai Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) dan agenda 2030 di tingkat daerah telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh 194 peserta dari pelbagai pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat sipil, persatuan migran, akademisi, dan media.
- 109 pejabat pemerintah daerah dan mitra masyarakat sipil dilatih mengenai Inisiatif Bersama Migrasi dan Pembangunan atau *Joint Migration Development Initiatives (JMDI)* untuk **pengelolaan migrasi dan memaksimalkan potensi migrasi** di tingkat daerah.
- Pelibatan pemimpin daerah untuk memperkuat prioritas **tata kelola migrasi di daerah**.
- Melakukan **asesmen celah kebijakan migrasi** dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada tingkat daerah. Sesi FGD diadakan dengan **6 area tujuan**: Mataram, Lombok Timur, Makassar, Maros, Semarang, and Grobogan, dan dihadiri oleh **180 peserta**. Melakukan survei untuk menilai kebutuhan para pekerja migran, mencakup **300 respons**, yang 50% di antaranya adalah pekerja migran perempuan.
- Asesmen **Indikator Tata Kelola Migrasi Lokal** dilakukan di Provinsi Jawa Tengah untuk mengumpulkan **76 indikator dari 58 organisasi perangkat daerah/OPD** (tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota), dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator. Proses tersebut melibatkan pertemuan awal, Diskusi Kelompok Fokus (FGD), konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan pertemuan validasi. Sebagai bagian dari hasil penilaian, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan peraturan nasional untuk memfasilitasi akses layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah bagi pekerja asing. Layanan daerah yang dapat diakses secara online juga tersedia bagi warga negara Indonesia di wilayah Jawa Tengah yang ingin beremigrasi.
- Melakukan **7 Diskusi Kelompok Terarah (FGD)** pada studi kelayakan dengan sensitivitas gender terhadap mekanisme keuangan inovatif terkait migrasi di empat target area yaitu: **Semarang, Mataram, Makassar, dan Jakarta** yang dihadiri **total 180 peserta yang aktif** perwakilan dari lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok migran beserta keluarga mereka. Terdapat dua faktor kunci yang menekankan pentingnya studi ini. Pertama, terbatasnya kemampuan APBN untuk mendukung biaya migrasi calon pekerja migran Indonesia. Kedua, kurangnya pengetahuan dan perencanaan keuangan di kalangan pekerja migran dan rumah tangga mereka, baik sebelum dan sesudah migrasi, memerlukan solusi keuangan inovatif untuk menjembatani kesenjangan ini.

# PENCAPAIAN UTAMA

(per Desember 2023)

## Penerapan berbasis HAM dan Responsif Gender Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM)

- Meningkatkan kapasitas pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menerapkan **implementasi KGM yang berbasis hak asasi manusia dan responsif gender**. Pelatihan diikuti oleh 74 peserta (70% Perempuan).
- Meningkatkan kesadaran pemerintah atas **elayanan publik responsif gender** bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Seminar tersebut dihadiri oleh 140 peserta (72 perempuan), termasuk pejabat konsuler dari berbagai kedutaan dan konsulat.
- Melakukan diskusi mengenai **Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender** dengan 61 peserta, termasuk 18 organisasi masyarakat sipil, 8 lembaga pemerintahan, 3 universitas, 5 mitra pembangunan dan PBB.
- Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan berkualitas bagi **pekerja migran perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia**. Melatih 147 pejabat dan staf konsuler dari 59 kedutaan dan konsulat Indonesia di 37 negara yang terdiri dari 67 perempuan dan 80 laki-laki.
- Membekali 233 perempuan purna dan calon pekerja migran, 59 pengurus Koperasi Mitra Dhuafa, dan 139 pasangan lelaki dengan **pengetahuan dan keterampilan tentang migrasi yang aman, kesetaraan gender dan pengasuhan anak secara kolektif, perencanaan keuangan, dan kewirausahaan digital**.
- Menyelenggarakan serangkaian konsultasi untuk menyusun *policy brief* dan advokasi untuk **memperkuat mekanisme rujukan dan koordinasi, yaitu pertemuan pemangku kepentingan Pemetaan Praktik Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan** dengan pemerintah, lembaga penegak hukum dan penyedia layanan, serta komunitas/organisasi pekerja migran yang dihadiri oleh 181 orang yang terdiri dari 142 orang perempuan dan 39 orang laki-laki di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
- Untuk meningkatkan akses pekerja migran perempuan ke **Aplikasi Safe Travel** dengan lebih baik, telah dikembangkan desain penelitian yang mencakup survei, wawancara, dan diskusi kelompok fokus (FGD).

Program bersama ini telah menghasilkan **narasi dan persepsi positif** terhadap migran dan pengungsi melalui pelatihan dan diskusi yang memfokuskan pada kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional dengan **mempromosikan hak asasi seluruh migran** di seluruh tahapan dari siklus migrasi.

## MITRA PELAKSANA



KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN  
RDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA  
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian  
Hukum dan HAM



BP2MI  
Badan Pelindungan  
Pekerja Migran  
Indonesia



BADAN PUSAT STATISTIK



DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



PUSAT  
INVESTASI  
PEMERINTAH

LRC - KJHAM



Legal Resource Center  
untuk Keadilan Jender  
dan Hak Asasi Manusia



SBMI



LBH-APIK  
NUSA TENGGARA BARAT